

Kontestasi Partai Politik di Sumatera Utara pada Masa Demokrasi Liberal 1952-1955

Muhammad Fijar Lazuardi,* Yety Rochwulaningsih
Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia
*mfijarlazuardi@gmail.com

Abstract

This study aims to convey the contestation of political parties in North Sumatra on Liberal Democracy Period in 1952-1955. Using the historical method, it focused on the conflict between political attitudes of North Sumatran and political parties through various concepts, such as democracy, conflict, contestation, and ideology. In Liberal Democracy Period, some of the political events in North Sumatra impacted the national political situation. Generally, there were three main issues impacted to the political contestation in the regional and national level, including land dispute, armed conflict, and oil-well matters. These events created political friction among society and the political elite. Land dispute in North Sumatra created two opposing attitudes who support the land to be given to foreign capital and the opponent. The armed conflict in Aceh created four political attitudes, including the rebels, the government, the Islamic traditional clerics, and the neutral. Meanwhile, North Sumatra oil-well matter created the supporter for nationalization and the supporter against the foreign capital. These political attitudes impacted to result of the Indonesian first election in 1955. The winner parties in the election were Masyumi, PNI, Parkindo, and PKI. Those parties had a strong influence on colonial, revolution, and Liberal Democracy Period. The winner of these elections gained positions in parliament.

Keywords: *Political Contestation; North Sumatra; Liberal Democracy.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengulas kontestasi partai-partai politik di Sumatera Utara pada periode Demokrasi Liberal. Dengan menggunakan metode historis, kajian ini berfokus pada kehidupan partai politik di Sumatera Utara melalui berbagai konsep, seperti demokrasi, konflik, kontestasi, dan ideologi. Dalam periode Demokrasi Liberal, beberapa peristiwa politik di Sumatera Utara turut mempengaruhi situasi politik nasional. Secara umum, ada tiga masalah utama di tingkat regional dan nasional yang mempengaruhi situasi politik, antara lain sengketa tanah, konflik bersenjata, dan masalah eksplorasi minyak. Peristiwa-peristiwa ini menciptakan gesekan politik di antara masyarakat dan elite politik. Sengketa tanah di Sumatera Utara menciptakan dua sikap yang saling bertentangan, pihak yang mendukung memberikan tanah ke modal asing dan pihak yang tidak mendukung. Konflik bersenjata di Aceh menciptakan empat sikap politik, yaitu pihak pemberontak, pemerintah, ulama tradisional Islam, dan pihak yang netral. Sementara itu, masalah sumur minyak menciptakan pihak yang mendukung nasionalisasi dan yang melawan modal asing. Sikap politik ini berdampak pada hasil pemilu pertama Indonesia pada 1955. Partai-partai pemenang dalam pemilu adalah Masyumi, PNI, Parkindo, dan PKI. Partai-partai itu memiliki pengaruh kuat pada masa kolonial, revolusi, dan Periode Demokrasi Liberal. Pemenang pemilihan ini memperoleh posisi di parlemen.

Kata Kunci: Kontestasi Partai Politik; Sumatera Utara; Demokrasi Liberal.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu konsep politik yang banyak diterapkan di beberapa negara di dunia. Demokrasi menjamin kebebasan dalam menentukan sikap politik dari masing-masing individu. Akan tetapi, dampak dari demokrasi adalah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari konflik sosial dalam tataran politik adalah kontestasi politik. Kontestasi politik merupakan pertentangan gagasan antara dua kelompok politik yang berhadapan. Kontestasi politik tidak serta-merta dapat disamakan dengan istilah oposisi politik dalam pemerintahan dan parlemen. Oposisi politik adalah suatu sikap yang bertentangan dengan pemerintah menggunakan struktur politik yang berlaku, sedangkan kontestasi politik tidak selalu menggunakan struktur politik (Putten, 1970: 785-798). Jika merujuk pada konsep konflik yang disampaikan oleh Dahrendorf, maka kontestasi termasuk dalam kategori konflik horizontal (Dahrendorf, 1958: 170-185).

Pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959), Indonesia mengalami suatu perubahan mendasar dalam sistem politik nasional. Gagasan sistem demokrasi pada periode tersebut hadir sebagai antitesa dari sistem aristokrasi dan feodalisme di beberapa daerah di Indonesia prakemerdekaan. Untuk mewujudkan sistem demokrasi tersebut, beberapa daerah di Indonesia harus melewati masa revolusi sosial berupa penyingkiran golongan elite tradisional. Sumatera Utara pada 1950-an merupakan sebuah provinsi yang terdiri atas tiga keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Masing-masing keresidenan memiliki penguasa tradisional pada masa prakemerdekaan. Aceh memiliki sistem *uleebalang*, Sumatera Timur memiliki raja-raja berdaulat, dan Tapanuli memiliki kepala-kepala suku yang berkuasa atas suatu wilayah. Pada masa revolusi, tiga daerah ini mengalami perubahan struktur politik.

Sejak Perang Aceh berakhir pada 1903, kekuasaan di Aceh dipimpin oleh golongan *ulëëbalang*. Sama seperti daerah lain di Indonesia, paruh pertama abad ke-20 merupakan periode pergerakan di Aceh. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam memiliki pengaruh dalam membentuk konsep pergerakan bagi masyarakat Aceh. Pada 1939, rakyat Aceh mendirikan organisasi bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi ini merupakan inisiasi dari golongan ulama modernis di Aceh yang diketuai oleh Daud Beureueh. Pada masa pemerintahan Jepang, PUSA menjadi salah satu perpanjangan tangan dari Jepang dalam hal pemerintahan sipil dan tenaga militer. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi revolusi sosial di Aceh. Revolusi sosial itu mengakibatkan tewasnya golongan *ulëëbalang* (Morris, 1985: 93-98).

Dinamika sosial politik kesultanan di Sumatera Timur tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Aceh. Pada kurun terakhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan tembakau di pesisir Sumatera Timur. Pembukaan lahan tersebut melibatkan pemerintah lokal yang kemudian mengadakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan pengakuan tunduk pada penguasa kolonial dan penguasaan lahan-lahan ekonomi di daerah Sumatera Timur. Sumatera Timur memiliki dua puluh tiga kerajaan. Pembukaan lahan ekonomi itu mengakibatkan kesenjangan di antara golongan kesultanan dengan masyarakat. Raja-raja di Sumatera Timur membuka perkebunan-perkebunan tembakau dan mendatangkan kuli kontrak dari etnis Tionghoa dan Jawa. Perlakuan terhadap buruh yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku menyebabkan buruh-

buruh perkebunan di Deli menderita. Selain perkebunan, terdapat tambang minyak di Pangkalan Berandan, Langkat dengan kasus yang hampir serupa. Kesenjangan antara penguasa tradisional dan masyarakat membuat ideologi radikal dapat tumbuh dengan masif pada periode 1930 sampai dengan 1945, baik itu Islamisme maupun Komunisme. Puncaknya, terjadi revolusi sosial yang meruntuhkan kesultanan di Sumatera Timur pada 1946 (Reid, 2011: 316-321).

Tapanuli merupakan daerah bagi suku Batak. Subsuku Batak yang mendiami wilayah Tapanuli adalah Pakpak, Toba, Mandailing, dan Angkola. Sejarah Batak sebelum abad ke-19 hanya sedikit dibahas dalam historiografi Indonesia. Salah satu historiografi kolonial yang membahas suku Batak disampaikan oleh William Marsden. Pada pertengahan abad ke-19, para penyebar agama Kristen memulai proses kristenisasi di Tapanuli, baik berupa utusan resmi pemerintahan maupun organisasi keagamaan seperti *Rheinische Missionsgesellschaft* (RMG). Meskipun mendapat tantangan berupa Perang Batak, agama para penyebar agama Kristen ini sukses mengkristenkan wilayah-wilayah di Tapanuli. Pada masa pergerakan nasional, RMG diubah menjadi *Huria Kristen Batak Protestan* (HKBP) oleh golongan muda Batak (Aritonang dan Karel, 2008: 530-549). Tapanuli sebagai daerah dengan sistem pemerintahan tradisional yang bersifat pedesaan dan paternalistik tidak melewati kejadian revolusi berdarah seperti yang dialami oleh Aceh dan Sumatera Timur. Para “nasionalis” Tapanuli melakukan serah terima kekuasaan dari para penguasa tradisional dengan damai. Hal ini disebabkan oleh para pemuda Tapanuli mengedepankan jalan musyawarah untuk menyelesaikan masalah (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953: 78).

Tiga keresidenan di Sumatera Utara kemudian mengalami perubahan sistem politik dan sistem pemerintahan. Masyarakat yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan aristokrasi berubah menjadi demokrasi melalui jalan revolusi. Hal ini mengakibatkan sikap-sikap masyarakat Sumatera Utara menjadi terbuka dan dapat terlibat aktif dalam politik. Bersamaan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di tingkat nasional pada saat itu, partai-partai politik memanfaatkan setiap isu politik sebagai sarana untuk meraih suara rakyat yang mengakibatkan gesekan dan kontestasi di antara kelompok masyarakat. Di Sumatera Utara terdapat tiga isu utama yang memiliki muatan politik. *Pertama*, sengketa tanah di Sumatera Timur. *Kedua*, konflik bersenjata di Aceh. *Ketiga*, permasalahan tambang minyak Sumatera Utara.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode sejarah merupakan metode yang digunakan untuk mencari fakta-fakta dalam sumber-sumber sejarah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber dan rekaman sejarah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, sumber-sumber yang terkait dengan topik kajian ini telah disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui klasifikasi Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri. Kritik merupakan tahap seleksi sumber dan pengumpulan fakta. Kritik terdiri dari dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah seleksi dengan menilai kondisi fisik dan ciri yang tertangkap oleh indra. Kritik intern adalah seleksi terkait kandungan, informasi, dan fakta yang ada di dalam sumber atau rekaman sejarah. Interpretasi adalah tahap penyusunan fakta dan penafsiran dengan konsep dan teori yang ada yang terangkai

dalam imajinasi peneliti. Tahap terakhir adalah historiografi yang merupakan tahap penulisan dari hasil interpretasi dengan bahasa yang baik dan benar.

Sengketa Tanah di Sumatera Timur

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyerahkan kembali tanah-tanah konsesi kepada perusahaan perkebunan sebagai mana yang diamanatkan oleh Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemerintah memiliki alasan yang rasional terkait dengan pengembalian tanah tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka dapat dikatakan 30% tanah di Sumatera Timur merupakan tanah konsesi perusahaan asing. Sangat jauh jika dibandingkan dengan tanah warga sipil yang hanya 8%. Jika tanah seluas itu digunakan oleh para pengusaha asing dan negara ikut di dalam kontrak konsesi dengannya, maka keuntungannya akan sangat besar bagi keuangan negara. Keuntungan dari perkebunan-perkebunan tersebut dapat diatur di dalam perjanjian oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut ditambah dengan fakta bahwa kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur menjadi kerajaan-kerajaan yang kaya disebabkan oleh keuntungan dari kerja sama perkebunan itu. Selain raja-raja Sumatera Timur, tentu pemerintah mendapatkan keuntungan dari pengolahan tanah-tanah konsesi tersebut. Nilai ekspor Indonesia dari hasil-hasil pengolahan tanah konsesi oleh perusahaan asing juga cukup besar dengan menyentuh angka Rp 1.337.280.000 pada 1950. Keuntungan rata-rata yang didapat sebelum perang setiap tahunnya ditaksir mencapai f 191.500.000 (Tauchid, 1952: 13-15).

Atas dasar keuntungan itu pemerintah mengadakan usaha-usaha dengan mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan perusahaan perkebunan melalui jalan negosiasi. Sejak 1950 sampai dengan 1953, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang mengarah kepada kepentingan perusahaan perkebunan seperti relokasi penduduk liar di sekitar tanah konsesi dan pembentukan badan-badan pemerintah untuk mempermudah eksekusi tanah. Akan tetapi, usaha pemerintah tersebut mendapat tentangan dari masyarakat di beberapa wilayah. Meskipun telah dijanjikan uang ganti rugi oleh pemerintah, beberapa masyarakat menolak untuk pindah. Aksi pemerintah ini disebut dengan "pentraktoran" oleh masyarakat yang menolaknya. Pada Januari 1953, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1953 yang berkaitan dengan penguasaan tanah-tanah negara. Peraturan itu mengatur hubungan antara negara, perusahaan, dan masyarakat.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah organisasi tani yang terafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka menjadi semacam "pelindung" bagi kepentingan masyarakat yang menolak pemindahan. Di sisi lain, jajaran pemerintah yang melakukan kebijakan itu merupakan anggota dari Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), seperti Mohamad Roem sebagai Menteri Dalam Negeri dan Abdul Hakim sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dua tokoh tersebut menjadi sosok sentral dalam relokasi-relokasi yang dilakukan pemerintah terhadap petani. Penolakan paling keras terjadi pada 16 Maret 1953 di Tanjung Morawa. Bentrokan antara petani dan aparat kepolisian menyebabkan lima orang petani tewas dan belasan lainnya luka-luka. Peristiwa ini mendapat kecaman dari dalam masyarakat di Sumatera Utara dan parlemen di Jakarta.

Mengatasi hal ini, sikap pemerintah rupanya terbagi menjadi dua. Sikap pertama adalah mendukung pengembalian tanah-tanah perkebunan di Sumatera Utara kepada perusahaan asing dengan alasan ekonomi negara. Masyarakat yang mendukung sikap ini antara lain anggota,

simpatisan, dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Masyumi dan PSI. Sikap kedua adalah menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada rakyat yang telah mendudukinya sejak masa pendudukan Jepang dengan alasan Nasionalisme dan keberpihakan kepada rakyat. Adapun kelompok masyarakat yang memilih sikap ini adalah anggota, simpatisan, dan organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan PNI, PKI dan partai-partai politik pendukung pemerintah.

Konflik Bersenjata di Aceh

Pidato Sukarno di Amuntai, Kalimantan menyebabkan bangkitnya perseteruan lama antara golongan politik Islam melawan golongan politik nasionalis pada masa pergerakan dan perumusan dasar negara. Sukarno menyebutkan bahwa Indonesia bukan negara Islam atau negara agama lainnya, tetapi Indonesia adalah negara nasional yang menghimpun semua agama. Pidato tersebut menyebabkan golongan Islam menjadi antipati dengan golongan Nasionalis. Setidaknya ada beberapa peristiwa politik yang meruncingkan hubungan antara keduanya, seperti mosi tidak percaya Sidik Kertapati di parlemen, bubarnya kabinet Wilopo, pemecatan anggota-anggota Masyumi di jajaran pemerintahan, Mukhtar Alim Ulama di Medan, dan pemberontakan Aceh.

Pidato Sukarno mendapat protes keras dari golongan Islam terutama dari simpatisan partai Masyumi. Di Sumatera Utara, Front Mubaligh Islam menyangkan pidato Sukarno tersebut, mereka bahkan merencanakan untuk membahas perkara ini di dalam Mukhtar Alim Ulama dengan mengundang seluruh pemuka agama Islam se-Indonesia di Medan (*Tegas*, 9 Februari 1953). Sukarno melihat golongan Islam salah menafsirkan pidatonya. Ia menyampaikan berulang kali kepada pers bahwa yang dimaksud sebagai negara nasional adalah negara yang menjamin semua unsur politik dapat terlibat dalam penyusunan hukum negara, termasuk Islam. Selain melakukan penjelasan di media, Sukarno juga mengadakan safari politik untuk menjelaskan pidato itu, termasuk ketika dia berpidato di Aceh. Meskipun Sukarno telah menyampaikan maksud dari pidatonya tersebut di depan rakyat Aceh pada 16 Maret 1953, golongan Islam tetap melaksanakan Mukhtar Alim Ulama se-Indonesia di Medan pada 11 April 1953. Khusus untuk Aceh, PUSA mengadakan konferensi ketiganya pada 25 April 1953.

Pemberontakan Aceh menjadi salah satu peristiwa yang secara eksplisit menggambarkan konflik antara golongan Nasionalis dan Islam. Akan tetapi, jika dipelajari secara kritis, faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia merupakan faktor sosial budaya dan ekonomi. Dalam perdagangan misalnya, sejak ketentuan hukum Indonesia mengatur ekspor dan impor di pelabuhan, pedagang dan pengusaha besar Aceh tidak bisa leluasa melakukan perdagangan dengan Malaya. Hal ini berdampak pada pemasukan keuangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang menurun (Sjamsuddin, 1990: 67-82). Faktor-faktor politik merupakan pemicu terakhir dari pemberontakan ini. Beberapa faktor politik yang menyebabkan pemberontakan antara lain kontroversi pidato Sukarno di Amuntai, susunan kabinet Ali yang didominasi golongan nasionalis bahkan komunis, dan hilangnya posisi Masyumi di pemerintahan.

Pemberontakan Aceh membentuk empat sikap politik di tengah masyarakat. Sikap pertama menganggap bahwa pemberontakan Aceh merupakan suatu ancaman kepada negara dan harus dilawan dengan jalur militer. Sikap ini didukung oleh partai politik antara lain PNI, PIR, dan partai Nasionalis lainnya ditambah dengan PKI. Sikap kedua menolak pemberontakan Aceh dengan alasan pemberontakan tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Persatuan Tarbiyah Islamiyah

(Perti) dan NU merupakan partai politik yang mendukung sikap ini. Sikap ketiga adalah sikap netral yang menolak pemberontakan dan menolak aksi militer pemerintah pusat. Masyarakat yang mendukung sikap ini sebagian besar adalah simpatisan Masyumi dan organisasi di bawahnya serta masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari kedua belah pihak. Masyumi menganggap bahwa secara pemerintahan, pemberontakan Aceh tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, secara ideologis mereka terkesan mendukung pemberontakan Aceh tersebut. Terlebih lagi PUSA merupakan anggota istimewa dari Masyumi. Sikap keempat adalah mendukung pemberontak yaitu PUSA dan sebagian masyarakat Aceh. Seiring berjalannya waktu dan tekanan yang dilakukan oleh pemerintah, membuat semakin bertambah masyarakat yang mendukung pemberontakan.

Permasalahan Tambang Minyak di Sumatera Utara

Faktor yang menyebabkan tambang minyak ini menjadi sulit untuk diselesaikan adalah sikap tidak tegas pemerintah dalam mengambil keputusan. Sama seperti kasus sengketa tanah di Sumatera Timur, pemerintah juga menysar keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh negara jika pemerintah mau bekerja sama dengan perusahaan tambang asing. Akan tetapi, pada kasus tanah di Sumatera Timur pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan keuntungan tersebut, sedangkan dalam kasus tambang minyak ini pemerintah cenderung pasif dalam langkah-langkah penyelesaiannya. Masalah pengurusan yang sering berpindah-pindah juga menjadi faktor dalam permasalahan ini. Selain itu, faktor kepentingan pengusaha lokal juga menjadi faktor dalam permasalahan ini. Perusahaan lokal pada masa itu menginginkan kepentingan mereka diakomodasi. *Antara* mengabarkan jika di Sumatera Utara terdapat “lingkaran pedagang” tambang minyak lokal yang keberatan akan adanya nasionalisasi. Para pengusaha lokal ini mengatakan bahwa keuntungan yang mereka ambil adalah hasil dari penjualan minyak mereka kepada perusahaan asing. Perusahaan asing berusaha menekan biaya impor dan ekspor (Sutter, 1959: 832).

Setelah penyerahan kedaulatan pada 1949, perusahaan-perusahaan asing meneruskan pengerjaan pertambangan minyak di Pangkalan Berandan dan Aceh bersama dengan perusahaan lokal yang ada di wilayah tambang sekitar. Perusahaan-perusahaan tambang minyak asing yaitu *Shell*, *Stanvac*, dan *Caltex* yang memiliki kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda melanjutkan aktivitas penambangannya di Sumatera Utara dengan mengacu pada hasil KMB. Di samping itu, nilai ekspor minyak Indonesia terus meningkat sejak 1947 (Tauchid, 1952: 8-9). Meskipun terjadi kemerosotan yang sangat tajam antara 1938 dan 1947, yang mungkin disebabkan oleh perintah bumi hangus beberapa tambang minyak, peningkatan nilai ekspor ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang minyak di Indonesia tidak terganggu oleh situasi politik.

Keputusan Menteri Perekonomian Sumanang untuk mengembalikan tambang minyak Sumatera Utara diprotes oleh internal partai sendiri. Kongres PNI di Surabaya mencecar keputusan Sumanang untuk mengembalikan tambang minyak di Sumatera Utara kepada *Shell*. Sarino Mangoenpranoto, seorang anggota parlemen dari seksi ekonomi, mengatakan bahwa tambang minyak Sumatera Utara dapat mengeluarkan minyak tanpa dipompa sekalipun. Maka dari itu, suatu kesalahan apabila memberikan tambang minyak itu kepada pihak asing. Hal tersebut mudah dilakukan karena perusahaan asing itu telah abis kontrak. Akan tetapi, Sumanang mengatakan bahwa negara belum memiliki uang untuk menasionalisasi tambang minyak di Sumatera Utara. Hal tersebut berbeda dengan tambang minyak di Cepu. Nasionalisasi tambang minyak Sumatera Utara

hanya menunggu waktu saja (Sutter, 1959: 835). Sikap tidak tegas pemerintah disebabkan oleh begitu banyak pertentangan di dalam tubuh pemerintahan dan parlemen. Dalam satu koalisi pemerintahan terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Masyumi di satu sisi mendukung pengembalian sedangkan PNI mendukung nasionalisasi di sisi yang lain.

Ketegasan muncul pada masa Kabinet Ali Sostroamidjojo mengambil alih pemerintahan. Saat sekelompok pengusaha Jepang ingin melakukan kerja sama, pemerintah menolak kerja sama tersebut. Menteri Iskaq menunjuk Nirwonojudo sebagai koordinator tambang minyak Sumatera Utara. Nirwonojudo langsung mengambil alih komando dan membuat beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambilnya adalah mengganti dua pemimpin umum dari tambang minyak di Aceh dan Langkat (Bartlet, 1972: 127). Keberadaan Nirwonojudo membawa perubahan positif pada pengelolaan tambang minyak Sumatera Utara.

Permasalahan ini membentuk dua sikap politik di masyarakat dan pemerintahan. Sikap pertama adalah mendukung pengembalian tambang minyak Sumatera Utara kepada perusahaan asing dengan alasan ekonomi dan modernisasi. Masyarakat dengan sikap ini merupakan anggota, simpatisan, dan golongan buruh yang terafiliasi dengan Masyumi dan PSII. Sikap kedua adalah mendukung pemerintah untuk menasionalisasi tambang minyak Sumatera Utara dengan alasan keberpihakan kepada rakyat dan bangsa. Sikap ini dipilih oleh masyarakat yang merupakan anggota, simpatisan, dan golongan buruh yang terafiliasi dengan PNI.

Pemilihan Umum di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara proses kampanye berjalan dengan penyampaian yang hitam dan putih. Masing-masing daerah di Sumatera Utara telah menunjukkan sikap politiknya jauh sebelum masa kampanye. Secara politik identitas, masyarakat Aceh dan Sumatera Timur tentu memilih Masyumi, sedangkan masyarakat Tapanuli akan memilih Parkindo dalam Pemilu. Akan tetapi, kampanye partai-partai politik untuk mengambil suara masyarakat secara aktif terjadi di desa-desa atau kampung-kampung. Sebagian besar agen-agen kampanye partai berfokus pada masyarakat di perkapungan yang masih relatif baru dibandingkan dengan perkampungan lama. Hal ini karena masyarakat kampung lama cenderung tertutup sedangkan kampung baru lebih terbuka terhadap perubahan (Feith, 1999: 44).

PKI di Sumatera Utara melakukan strategi kampanye di Sumatera Utara dengan cukup baik. Mereka datang ke kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang imigran dan miskin lalu menawarkan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di Sumatera Timur, PKI membantu masyarakat yang dianggap sebagai penduduk ilegal oleh pemerintah. Mereka menjelaskan bahwa negara berada dalam kekuasaan asing yang akan menjajah kembali Indonesia. PKI menunjukkan perusahaan-perusahaan perkebunan asing yang menduduki tanah-tanah yang telah lama mereka tinggali. Penduduk-penduduk kampung ini lebih sering mendengar kampanye-kampanye yang bersifat *xenophobia* ketimbang program-program yang akan dijalankan (Kroef, 1957: 407-420).

Partai politik besar seperti PNI dan Masyumi biasanya lebih mengendalikan permainan dari sudut pandang yang lebih luas. Pada Kabinet Ali, PNI dengan kekuasaannya mencabut pamong praja yang terafiliasi dengan Masyumi. Jabatan-jabatan yang strategis di pemerintahan daerah diserahkan kepada orang-orang, yang paling tidak, bukan simpatisan Masyumi (*Tegas*, 5 September 1953). Masyumi melakukan manuver politik yang tidak kalah berbahaya. Pada 11 sampai dengan

13 April 1953, golongan Islam yang terafiliasi dengan Masyumi mengadakan Mukhtamar Alim Ulama di Medan. Hasil dari Mukhtamar tersebut menekankan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk memilih calon-calon dari partai Islam atau yang mendukung Islam. Organisasi-organisasi Islam di Sumatera Utara seperti PUSA, Front Mubaligh, dan *Jamiatul Wasliyah* mengumumkan hasil mukhtamar kepada masyarakat (*Tegas*, 24 April 1953).

Hal perlu mendapat perhatian pada Pemilu di Sumatera Utara pada 1955 adalah beberapa daerah di Aceh tidak dapat menjalankan Pemilu karena berada dalam wilayah konflik bersenjata. Saat pelaksanaan Pemilu DPR pada 29 September 1955, beberapa daerah di Aceh menghadapi gangguan keamanan dari gerombolan Daud Beureueh. Hal ini menyebabkan beberapa daerah tidak dapat melaksanakan Pemilu. Total penduduk yang kehilangan suaranya berjumlah 18.587 orang.

Hasil Pemilu resmi disahkan oleh Panitia Pemilihan Sumatera Utara pada 30 Desember 1955. Panitia menyampaikan bahwa jumlah surat suara yang masuk berjumlah 2.215.684 suara (90,5 % dari jumlah pemilih terdaftar). Surat suara yang sah berjumlah 2.132.477 suara, suara tidak sah 83.207 suara. Suara terbanyak diraih oleh Masyumi dengan 788.163 suara, disusul oleh PNI dengan 329.214 suara, Parkindo dengan 291.200 suara, dan PKI dengan 258.683 suara (ANRI, Arsip Sekretariat Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid 2, No. 1131). Pada Pemilu Konstituante yang dilaksanakan pada 29 Desember 1955, urutan perolehan suara sama dengan urutan perolehan suara pada Pemilu DPR. Akan tetapi, ada penurunan dan peningkatan perolehan suara dari partai-partai.

Dampak Kontestasi pada Pemilu di Sumatera Utara

Peristiwa-peristiwa di Sumatera Utara yang menyebabkan kontestasi politik antarpolitical, meletakkan Masyumi sebagai pihak “antagonis” di mata rakyat. Pada kasus sengketa tanah, Masyumi terlibat dalam Peristiwa Tanjung Morawa. Pada kasus konflik bersenjata Aceh, Masyumi diduga mendukung pemberontakan Daud Beureueh dengan sikap netralnya. Pada permasalahan tambang minyak Sumatera Utara, menteri-menteri dari Masyumi tidak memiliki sikap yang tegas dalam kasus tersebut. Partai pertama yang mengaitkan sikap-sikap politik Masyumi sebagai bentuk pro-asing adalah PKI. Pada November 1954, PKI menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini tentu menjadi senjata bagi lawan politik Masyumi untuk memojokkan Masyumi di daerah Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, hasil Pemilu cukup mengejutkan di mana PKI menduduki peringkat keempat. Suatu hasil yang mengejutkan bagi PKI yang merupakan partai Komunis namun mampu meraih suara di kawasan Islam. Kemungkinan besar, PKI meraih suara di daerah-daerah perkotaan yang cenderung heterogen. Kampanye-kampanye PKI juga menggunakan organisasi *underbouw* seperti BTI dan SOBSI untuk meraih simpati massa buruh, petani, dan kaum migran. Strategi politik yang dilakukan oleh PKI nampaknya berhasil untuk mengambil suara rakyat. Pembelaan PKI pada rakyat yang terkena penggusuran di tanah-tanah Sumatera Timur ikut memberi sumbangan suara. Selain itu, Sidik Kertapati yang merupakan tokoh yang mengajukan Mosi Tidak Percaya untuk Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem atas Peristiwa Tanjung Morawa terdaftar sebagai calon dari PKI untuk daerah pemilihan Sumatera Utara (ANRI, Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Jilid 1 No. 1920). PKI yang tergabung dalam 35 partai pendukung Panitia Tuntutan Rakyat menunjukkan keaktifan partai ini untuk menyuarakan nasionalisasi tambang minyak Sumatera

Utara. Aksi-aksi politik yang dilakukan oleh PKI dalam setiap isu politik di Sumatera Utara menunjukkan strategi partai yang baik dan terencana.

Parkindo meraih peringkat ketiga. Suatu pencapaian yang cukup baik bagi kalangan minoritas di Sumatera Utara. Parkindo berfokus di wilayah-wilayah Batak di Tapanuli, Karo, dan Simalungun. Di samping itu, DGI pada Juli 1955 memerintahkan umat Kristiani untuk memilih Parkindo dalam Pemilu. Perintah dari DGI tentu memengaruhi perolehan suara dari Parkindo di Sumatera Utara. Suara Parkindo juga berasal dari kalangan perantau dari Tapanuli yang tinggal di tinggal di kota-kota pesisir Sumatera Timur seperti Medan, Langkat, dan Binjai.

PNI menduduki peringkat kedua di Sumatera Utara. Strategi politik PNI sama dengan PKI, mereka mengincar masyarakat kalangan bawah. Pada saat terjadinya kasus pentraktor yang dilakukan oleh Gubernur Hakim, PNI termasuk golongan yang menolak keras hal tersebut. Rakyat yang menjadi korban dalam kasus ini, dengan mudah menerima PNI sebagai bagian dari mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PNI merupakan partai dengan ideologi kaku namun abstrak terlihat pada kasus Tanjung Morawa. Belum ditemukan fakta bahwa rakyat yang tergusur merupakan simpatisan salah satu partai politik. Pada saat terjadi pentraktor di tanah-tanah perusahaan, orang-orang yang aktif menyuarakan perlawanan adalah organisasi-organisasi buruh dan tani yang terafiliasi dengan partai politik. Rakyat yang merasa ditindas dan diperlakukan dengan tidak adil mendapat sokongan dari organisasi-organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rakyat bergerak atas dasar penderitaan, bukan dari dorongan ideologi pribadi.

Meskipun strategi politik PNI mengarah kepada masyarakat kalangan bawah, tetap terdapat kemungkinan, mereka juga mengincar suara dari kalangan bangsawan kerajaan atau aristokrasi di Sumatera Timur. Kekuatan PNI di Sumatera Utara juga di pengaruhi oleh media massa. Surat kabar harian *Waspada* menjadi salah satu surat kabar yang paling jelas menyuarakan propaganda terhadap prestasi Kabinet Ali dan keburukan dari Masyumi sebagai partai oposisi. Hal tersebut dibuktikan saat Nirwonojudo ditunjuk sebagai koordinator tambang minyak Sumatera Utara. Pembahasan mengenai kemajuan tambang minyak muncul secara rutin pada harian *Waspada* sejak Maret sampai dengan Desember 1954. Selain itu, *Waspada* juga memberitakan keberpihakan Kabinet Ali pada penduduk yang menduduki tanah perusahaan asing. *Waspada* memberitakan kesuksesan Kabinet Ali dalam penyelesaian permasalahan tanah.

Masyumi merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak di Sumatera Utara pada Pemilu 1955. Masyumi sebagai partai Islam memiliki basis massa yang kuat di Sumatera Utara. Sumber perolehan suara untuk Masyumi paling banyak berasal dari kota-kota pesisir Sumatera Timur dan Aceh bagian utara. Meskipun di tempat-tempat tersebut mereka tetap menghadapi persaingan, seperti misalnya Masyumi berhadapan dengan PNI di Sumatera Timur dan Perti di Aceh, Masyumi tetap menunjukkan kapasitasnya sebagai partai politik Islam terbesar. Keuntungan Masyumi pada Pemilu di Sumatera Utara dimulai pada saat dilaksanakannya Mukhtar Alim Ulama di Medan pada April 1953. Mukhtar itu banyak berpengaruh pada perolehan suara Masyumi di Sumatera Utara. Organisasi-organisasi Islam yang menjadi anggota dari Masyumi mengerahkan anggotanya untuk mendukung Masyumi. Dugaan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan DI di Aceh dapat ditangkal pada pelaksanaan Pemilu ini. Jika Masyumi mendukung PUSA atau Daud Beureueh dalam pemberontakan ini, maka gerombolan DI tidak akan menyerang dan mengganggu jalannya Pemilu di Sumatera Timur karena akan berdampak pada

perolehan suara dari Masyumi. Semua tuduhan yang dialamatkan kepada Masyumi dijawab dengan kemenangan Masyumi di Sumatera Utara.

Sumatera Utara pada 1952 sampai dengan 1955 dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang menentukan arus politik nasional. Hal tersebut disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara berpengaruh pada pemerintah dan parlemen di pemerintahan pusat. Secara garis besar, Pemilu 1955 di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan lancar dengan beberapa catatan mengenai keamanan. Heterogenitas masyarakat yang tinggi ditambah dengan kontestasi politik yang sengit menjadikan Sumatera Utara sebagai bukti bahwa masyarakat multikultur dapat melaksanakan demokrasi dengan baik dan adil.

Simpulan

Sumatera Utara pada periode 1950-an merupakan sebuah miniatur dari masyarakat multikultur di Indonesia. Posisinya sebagai salah satu wilayah berkembang pada masa kolonial menyebabkan Sumatera Utara menyerap berbagai macam aliran dan ideologi politik baik dari barat, timur, maupun Nasionalisme Indonesia. Keberagaman etnis, agama, dan identitas sosial lainnya menjadikan Sumatera Utara mendapat perhatian dari partai-partai politik dalam meraih suara pemilih dalam Pemilu 1955.

Kontestasi politik yang terjadi di Sumatera Utara menunjukkan kebutuhan perolehan suara partai politik untuk Pemilu menyebabkan partai politik hanya menilai suatu kasus dari satu sudut pandang dan menafikan sudut pandang yang lain. Selain itu, kontestasi politik juga menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat bertransformasi menjadi isu politik atas dasar mengambil simpati rakyat.

Pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Utara merupakan contoh bagi partai-partai politik Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu. Usaha PKI dan PNI dalam menjalankan strategi kampanye ke wilayah-wilayah buruh, petani, dan imigran menyebabkan partai itu meraih suara di wilayah yang secara umum merupakan wilayah yang didominasi oleh golongan Islam dan Kristen. Dapat dilihat juga bagaimana Masyumi dan Parkindo memaksimalkan kampanye di lumbung suara masing-masing dengan memanfaatkan agama sebagai cara efektif dalam berpolitik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keberagaman suatu wilayah bukan menjadi suatu penghalang bagi pelaksanaan demokrasi.

Referensi

- ANRI "Daftar Calon Anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Seluruh Daerah" Arsip Sekertariat Negara Kabinet Perdana Menteri Jilid 1 No. 1920.
- ANRI "Pengumuman Konsepsi Hasil Pemungutan Suara dan Pembagian Kursi Pertama dari Pemilihan Umum untuk DPR Sumatera Utara." Arsip Sekertariat Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid 2, No. 1131.
- Aritonang, Jan Sihar dan Karel Steenbrink (2008). *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Bartlet III, Anderson dkk. (1972). *Pertamina Indonesian National Oil*. Jakarta: Amerasian.
- Dahrendorf, Ralf (1958) "Toward a Theory of Social Conflict." *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2 (2): 170-183.
- Feith, Herbert (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Kementerian Penerangan Republik Indonesia (1953). *Republik Indonesia: Sumatra Utara*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Kroef, Justus van Der (1957). "Indonesia's First Election: A Sociological Analysis II." *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 16 (4): 407-420.
- Morris, Eric (1985) "Aceh: Social Revolution and the Islamic Vision." dalam Audrey Kahin, dkk., *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution*. Honolulu: University of Hawaii.
- Reid, Anthony (2011). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (1990). *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sutter, John O. (1959). *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy*. Ithaca: Cornell University.
- Tauchid, Mochammad (1952). *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Penerbit Tjakrawala.
- Tegas*, 24 April 1953.
- Tegas*, 5 September 1953.
- Tegas*, 9 Februari 1953.
- van Putten, Jan (1970). "Political Contestation and Political Protest." *Il Politico*, Vol. 35 (4): 785-798.